

BAB VIII

MASA DEPAN SERTIFIKAT HALAL DAN INTEGRITAS EKONOMI SYARIAH DI ERA 5.0

A. Rekapitulasi dan Tantangan Masa Depan

Konsep *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. *Society 5.0* adalah era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Konsep *society 5.0* ini digagas oleh negara Jepang yang memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia sehingga manusia benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Sedangkan *society 5.0* dalam pandangan Islam sangatlah mendukung dalam perkembangan teknologi dan Islam juga menganjurkan adanya inovasi dalam mengembangkan teknologi sehingga secara prinsip *society 5.0* sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.¹⁵³

Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat dimana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Sebenarnya konsep revolusi 4.0 dan *Society 5.0* tidak memiliki perbedaan yang jauh. Hanya saja konsep *Society 5.0* lebih memfokuskan konteks terhadap manusia. Jika Revolusi

¹⁵³ Budi Utomo, 'Tantangan Mahasiswa Dalam Menghadapi Ekonomi Islam Di Era Society 5.0', *Stiedewantara.Ac.Id*, 20 Februari 2020 <<https://stiedewantara.ac.id/menghadapi-ekonomi-islam-di-era-society-5-0-ukm-center-of-islamic-study-cois-stie-pgri-dewantara-jombang-gelar-seminar-ekonomi-islam/>> (Diakses, 21 September 2025).

industry 4.0 menggunakan AI, dan kecerdasan buatan yang merupakan komponen utama dalam membuat perubahan di masa yang akan datang. Sedangkan *Society 5.0* menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya.

Sertifikat halal menghadapi tantangan signifikan seperti integrasi teknologi canggih (*IoT, AI, blockchain*) untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan produk halal secara digital, sekaligus menjaga keamanan data dan privasi yang sesuai prinsip syariah di era 5.0. Harmonisasi standar halal global dan perluasan akses sertifikasi terutama untuk UMKM menjadi kunci agar ekosistem halal inklusif dan berkelanjutan. Tantangan lain mencakup penguatan kepercayaan konsumen melalui edukasi dan transparansi, serta adaptasi budaya digital dalam lembaga terkait sertifikasi halal.¹⁵⁴

Masa depan sertifikat halal di Era 5.0 ditandai dengan transformasi digital yang mempercepat proses sertifikasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses, terutama bagi pelaku UMKM. Integritas ekonomi syariah di era ini sangat tergantung pada penguatan ekosistem digital melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence* (AI), *blockchain*, *big data*, dan *Internet of Things* (IoT).

¹⁵⁴ LPH BMS, *Tantangan dan Peluang Industri Halal di Era Digital*, "3 Maret 2025, <https://www.lphbms.com/post/tantangan-dan-peluang-industri-halal-di-era-digital> (Diakses 24 Oktober 2025).

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga mendukung inklusi keuangan syariah yang sesuai prinsip maqashid syariah. Namun, tantangan utama masih ada, terutama terkait literasi digital yang rendah di kalangan pelaku usaha kecil, kesiapan regulasi, serta kebutuhan tata kelola dan pengawasan syariah yang tegas dan adaptif terhadap inovasi teknologi.

Rekomendasi kebijakan dan langkah praktis untuk masa depan sertifikasi halal dan integritas ekonomi syariah di Era 5.0 antara lain:¹⁵⁵

1. Penguatan Literasi Digital dan Inklusi Teknologi

Menyediakan pelatihan literasi digital bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses dan memanfaatkan platform digital sertifikasi halal. Memastikan akses teknologi yang merata, terutama bagi usaha mikro dan usaha kecil yang selama ini tertinggal dalam proses digitalisasi.

2. Pengembangan Infrastruktur Digital untuk Sertifikasi

Mendorong transformasi digital BPJPH dengan integrasi *AI* dan blockchain untuk mempercepat proses sertifikasi dan memastikan validasi data pelaku usaha secara transparan dan akurat. Menggunakan big data

¹⁵⁵ LPH BMS, *Tantangan dan Peluang Industri Halal di Era Digital*, "3 Maret 2025, <https://www.lphbms.com/post/tantangan-dan-peluang-industri-halal-di-era-digital> (diakses 24 Oktober 2025).

untuk pengambilan keputusan strategis dan monitoring audit halal berbasis teknologi canggih.

3. Harmonisasi Standar Halal Internasional

Melakukan harmonisasi standar dan sertifikasi halal global dengan teknologi *blockchain* guna mendukung perdagangan internasional dan memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar global. Memastikan standar halal yang jelas, konsisten, dan mudah diakses untuk membangun kepercayaan konsumen yang semakin kritis dan cerdas.

4. Regulasi dan Pengawasan Syariah Adaptif

Memperkuat aturan dan pengawasan tata kelola ekonomi syariah yang mengakomodasi inovasi teknologi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung maqashid syariah. Sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk regulator, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan akademisi, untuk menyusun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan era digital.¹⁵⁶

5. Edukasi dan Kampanye Digital

Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang

¹⁵⁶ LPH BMS, *Tantangan dan Peluang Industri Halal di Era Digital*, "3 Maret 2025, <https://www.lphbms.com/post/tantangan-dan-peluang-industri-halal-di-era-digital> (diakses 24 Oktober 2025).

pentingnya sertifikasi halal serta manfaat ekonomi syariah dalam era digital. Meningkatkan kesadaran akan sertifikasi halal sebagai strategi bisnis cerdas yang relevan dengan tren pasar global dan gaya hidup halal modern.

Sektor produk halal menjadi bidang yang turut mendominasi bisnis perdagangan global. Dengan potensi pasar yang besar, yaitu masyarakat muslim dunia saat ini sudah melebihi 1,6 miliar, juga didukung berkembangnya gaya hidup halal masyarakat non-muslim, menyebabkan potensi pasar produk halal semakin meningkat. Produk industri halal akan dapat diterima dan diminati masyarakat sendiri dan bisa menjadi andalan komoditi ekspor, mampu menggerakkan sektor riil. Industri produk halal menjadi jawaban dari segala bentuk pekerjaan di bidang pengadaan kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya dan bisa merespon tantangan zaman modern di era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*.¹⁵⁷

Industri halal di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didukung oleh Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 yang disusun oleh Komite Nasional

¹⁵⁷ Burhanuddin dkk Al-Butary, 'Strategi Perencanaan Pengembangan Industri Halal Menuju Era Revolusi Industri Dan Society 5.0 Oleh Al Jam"iyatul Washliyah', Prosiding SENAPENMAS, 3 (2021), 1–8 (h. 5)

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dokumen ini menyoroti pentingnya ekonomi syariah dan gaya hidup halal sebagai elemen strategis dalam mendukung sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Data dari *State of the Global Islamic Economy Report* (SGIER) 2022 menunjukkan bahwa pengeluaran Muslim secara global tumbuh hingga 9,1% pada tahun 2022 untuk berbagai sektor ekonomi syariah, di luar sektor keuangan syariah. Di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 241,7 juta jiwa berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (atau 89,02% dari total populasi pada akhir 2022), potensi untuk pengembangan industri halal sangat besar.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan pentingnya jaminan halal pada seluruh rantai produksi. Proses ini mencakup pengadaan bahan baku, desain produk, produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri halal global.¹⁵⁸

Sertifikat halal telah berkembang menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, daya

¹⁵⁸ *Sharia Knowledge Centre*, 'Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Industri Halal Di Indonesia', *Www.Shariaknowledgecentre.Id*, 2023 <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/industri-halal/>> (Diakses, 21 September 2025).

saing UMKM, dan integritas ekonomi syariah. Perannya tidak hanya terbatas pada konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke sektor farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga keuangan syariah. Di era Society 5.0, sertifikasi halal mulai terintegrasi dengan teknologi digital seperti *blockchain*, *artificial intelligence (AI)*, dan *Internet of Things (IoT)* untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kecepatan layanan. Rekap ini menunjukkan bahwa sertifikat halal bukan sekadar regulasi, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Meskipun perkembangannya pesat, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, antara lain:¹⁵⁹

1. Standarisasi global: Setiap negara memiliki standar halal yang berbeda, sehingga diperlukan harmonisasi agar produk halal dapat diterima secara internasional.
2. Digitalisasi dan keamanan data: Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* menuntut kesiapan infrastruktur digital serta perlindungan data agar tidak disalahgunakan.

¹⁵⁹ Sharia Knowledge Centre, 'Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Industri Halal Di Indonesia', *Www.Shariaknowledgecentre.Id*, 2023 <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/industri-halal/>> (Diakses, 21 September 2025).

3. Kapasitas UMKM: Banyak pelaku UMKM masih terkendala biaya, literasi halal, dan pemanfaatan teknologi dalam proses sertifikasi.
4. Pengawasan dan keaslian: Dengan maraknya sertifikat palsu, diperlukan sistem validasi yang kuat untuk menjaga kepercayaan konsumen.¹⁶⁰
5. Keterlibatan global: Tantangan geopolitik dan ekonomi internasional juga memengaruhi keberterimaan produk halal di pasar dunia.

Di sisi lain, percepatan digitalisasi membuka peluang besar dalam transformasi sertifikasi halal dengan penggunaan teknologi seperti *blockchain*, *IoT*, dan *AI* yang dapat meningkatkan transparansi, keamanan data, dan efisiensi proses validasi produk halal. Namun inovasi teknologi ini juga menuntut penguatan kapasitas regulasi dan pengawasan agar tetap sesuai prinsip syariah dan penerapan etika digital. Peran lembaga seperti LPPOM dalam memberikan layanan pemeriksaan berbasis data laboratorium berstandar internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan praktis di lapangan, termasuk pengawasan bahan baku dan pencegahan kontaminasi silang. Ke depan, sinergi antara

¹⁶⁰ Sharia Knowledge Centre, 'Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Industri Halal Di Indonesia', *Www.Shariaknowledgecentre.Id*, 2023 <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/industri-halal/>> (Diakses, 21 September 2025).

pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci dalam mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang masa depan sertifikat halal sebagai fondasi integritas ekonomi syariah di era 5.0.¹⁶¹

Era wajib halal menghadirkan tantangan nyata bagi pelaku industri pangan dan *hospitality*. Mereka dituntut untuk tidak hanya memahami aspek sertifikasi halal secara cepat, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam operasional sehari-hari. Hal ini tidak mudah, karena mencakup pemenuhan standar halal yang ketat, pencegahan kontaminasi silang, serta verifikasi terhadap semua bahan baku dan rantai pasok, sesuai regulasi terbaru.¹⁶²

Bagi semua konsumen, terutama bagi umat Islam, produk halal adalah sebuah kebutuhan. Topik sertifikasi dan penandaan halal produk telah menarik banyak perhatian dalam sistem perdagangan internasional sebagai sarana untuk melindungi pelanggan muslim secara global dan sebagai sarana

¹⁶¹ Sharia Knowledge Centre, 'Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Industri Halal Di Indonesia', *Www.Shariaknowledgecentre.Id*, 2023 <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/industri-halal/>> (Diakses, 21 September 2025).

¹⁶² Miftahul Jannah and Malahayatic, 'Analisis Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia', *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14.2 (2024) 55–64 (h. 2)

untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi.¹⁶³

Disinilah peran LPPOM menjadi krusial. Dengan pendekatan ilmiah yang berbasis data laboratorium dan prinsip sesuai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), LPPOM membantu industri Indonesia tidak sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun daya saing global.

Bisnis halal di Indonesia menghadapi tantangan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Tiga rintangan eksternal adalah sebagai berikut: banyaknya negara pesaing; kurangnya konsistensi dalam sertifikasi halal yang diakui secara internasional; dan ketidakcocokan negara-negara muslim dalam hal menetapkan standar produk halal. Kesulitan yang muncul dari dalam masyarakat Indonesia meliputi kurangnya pengetahuan tentang halal di kalangan masyarakat Indonesia, masalah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan kurangnya kesadaran kompetitif di kalangan masyarakat Indonesia. Tantangan yang dihadapi industri halal di Indonesia pada tahun 2024 meliputi:

¹⁶³ Miftahul Jannah and Malahayatic, '*Analisis Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia*', MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam, 14.2 (2024) 55–64 (h. 2)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang kesadaran Halal Masyarakat Indonesia masih memerlukan lebih banyak pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya produk halal dan standar halal yang harus dipenuhi.
2. Keterbatasan infrastruktur
Indonesia masih memerlukan pengembangan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung industri halal, termasuk fasilitas produksi, logistik dan jaringan distribusi yang lebih efektif.
3. Proses sertifikasi halal masih membutuhkan waktu

B. Peluang Inovasi dan Strategi Kolaborasi

Transformasi digital membuka peluang inovasi seperti *smart contract syariah* dan *platform traceability* berbasis *blockchain* yang dapat memperkuat integritas sertifikasi halal. Kolaborasi strategis antara pemerintah (BPJPH), lembaga pengawas syariah (MUI, DSN), pelaku usaha, dan platform teknologi digital perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam ekosistem halal yang terintegrasi dan terpercaya.

¹⁶⁴Pendampingan dan pelatihan digital kepada UMKM sangat penting agar mereka dapat mengakses sertifikasi halal dengan

¹⁶⁴ Bank Indonesia, *Transformasi Digital dan Teknologi untuk Kemajuan Ekonomi Syariah*, "Ruang Media - News Release, 30 Oktober 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/news-release/Pages/sp_2623724.aspx (diakses 21 Februari 2026).

mudah dan cepat, sekaligus memperluas pangsa pasar halal nasional dan global.

Peluang inovasi dalam sertifikat halal di era 5.0 sangat besar dengan munculnya teknologi mutakhir seperti *blockchain*, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan (AI). *Blockchain* memungkinkan transparansi dan keterlacakan produk halal dari hulu ke hilir, sehingga setiap tahap produksi dan distribusi dapat diverifikasi dengan akurat dan auditable. IoT mendukung pemantauan kondisi produk secara real-time untuk memastikan kehalalan, sementara AI mempercepat proses analisis dan validasi sertifikasi halal secara efisien. Inovasi digital ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dan integritas sertifikasi, tetapi juga membuka akses pasar global yang lebih luas terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang dapat memanfaatkan *platform e-commerce* halal dan pelatihan digital untuk memperluas pangsa pasar mereka.¹⁶⁵

Upaya pengembangan ekosistem halal value chain dalam pembangunan industri halal dimulai dari input sampai outcome-nya, terlebih dalam menghadapi era society 5.0. Penguatan halal value chain meliputi beberapa sektor di antaranya (1) industri makanan dan minuman yang terdiri dari

¹⁶⁵ Bank Indonesia, *Transformasi Digital dan Teknologi untuk Kemajuan Ekonomi Syariah*, "Ruang Media - News Release, 30 Oktober 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/news-release/Pages/sp_2623724.aspx (diakses 21 Februari 2026).

bahan baku, manufaktur, *retailer*, pembiayaan, saluran distribusi dan teknologi. (2) *stakeholders* industri halal yaitu (a) pemerintah, (b) konsumen, (c) industri dan (d) investor. *Stakeholders* memiliki peranan sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan antara demand dan *supply* pada industri halal.¹⁶⁶

Ekonomi syariah telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan global. Salah satu kunci utama dalam memperkuat daya saing ekonomi syariah adalah melalui inovasi produk dan pengembangan sistem label halal yang kredibel. Keduanya memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang sesuai *syariah*.

Inovasi produk halal menjadi kebutuhan mutlak dalam merespons perkembangan zaman dan preferensi konsumen yang terus berubah. Pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan produk yang tidak hanya halal dari sisi syariat, tetapi juga unggul dari sisi kualitas, kemasan, keberlanjutan, serta nilai tambah. Misalnya, inovasi dalam produk makanan dan minuman halal yang mengedepankan bahan organik, rendah gula, ramah lingkungan, atau kemasan ramah

¹⁶⁶ Kholifatul Husna Asri and Amin Ilyas, 'Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0', *Sharia Economics Journal* 1.1 (2022) (h. 10)

lingkungan kini banyak diminati oleh konsumen, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga global. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip halal dapat berjalan beriringan dengan tren inovasi modern.

Inovasi produk dan pengembangan label halal merupakan faktor krusial dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah di Indonesia. Inovasi produk yang mengadopsi teknologi modern dan standar kualitas internasional, dikombinasikan dengan sertifikasi halal yang terpercaya, mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait perlu terus mendorong inovasi dan memperkuat sistem sertifikasi halal sebagai strategi utama dalam memperkuat posisi ekonomi syariah di era globalisasi.¹⁶⁷

Era *Society 5.0* adalah konsep yang memanfaatkan teknologi modern berbasis pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyederhanakan kehidupannya. Era ini menekankan pada penggunaan teknologi kecerdasan buatan, *Internet of Things*, dan *Big Data*, dan *Blockchain* dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas

¹⁶⁷ Bayu Priyadi and Dkk, 'Inovasi Produk Dan Pengembangan Label Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Syariah', *Journal Of Economics and Business*, 3.1 (2021), pp. 167–86.4)

hidup, mengatasi permasalahan sosial, serta menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam *Fifth Science and Technology Basic Plan* oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016. Society 5.0 dikembangkan sebagai solusi atas tantangan yang muncul dari Revolusi Industri 4.0, yang lebih menekankan pada digitalisasi dan otomatisasi industry. Konsep tatanan dunia baru ini muncul karena keterbatasan manusia dalam menyaring informasi penting.

C. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Praktis

Diperlukan kebijakan akselerasi digitalisasi sertifikasi halal yang mengutamakan keamanan data dan kepatuhan syariah, termasuk penguatan regulasi dan standar operasional lembaga sertifikasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis teknologi, serta mengoptimalkan layanan online agar sertifikasi mudah diakses secara nasional. Mendorong integrasi sertifikat digital dengan perdagangan elektronik dan logistik halal juga menjadi langkah praktis yang meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar halal.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 48-52 (Jakarta: Sekretariat Negara, 16 Oktober 2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024>; Bank Indonesia, *Transformasi Digital dan Teknologi untuk Kemajuan Ekonomi*

1. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Halal yang Adaptif dan Terintegrasi

Pemerintah perlu memperbarui dan menyelaraskan regulasi terkait Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal, dan ekonomi/keuangan syariah agar mampu menjawab dinamika teknologi seperti *blockchain*, *traceability* digital, dan sistem AI. Pengaturan harus mencakup kejelasan standar, pengawasan rantai pasok, mekanisme audit, serta penalti bagi produk yang mengklaim halal tanpa validasi. Selain itu, memperkuat kelembagaan seperti BPJPH, KNEKS, dan aparat daerah untuk memastikan implementasi regulasi berjalan efektif di semua tingkatan.¹⁶⁹

2. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi dalam Proses Sertifikasi dan Rantai Nilai Halal

Dengan era 5.0, teknologi digital dan layanan berbasis AI/*blockchain* menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian, transparansi, dan efisiensi dalam sertifikasi halal. Misalnya, sistem *traceability* berbasis *blockchain* agar konsumen bisa memverifikasi asal bahan, proses produksi,

Syariah," 30 Oktober 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2623724.aspx (diakses 25 Oktober 2026).

¹⁶⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 155-163 (menggantikan PP No. 39/2021), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 99, Tambahan Lembaran Negara No. 7067 (Jakarta: Sekretariat Negara, 16 Oktober 2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024> (diakses 25 Oktober 2025).

dan jalur distribusi suatu produk halal. Teknologi juga dapat dipakai untuk mempercepat proses sertifikasi melalui platform daring, audit jarak jauh, dan modul *self-assessment* bagi UMKM. Dukungan insentif, fasilitas digital, dan pelatihan teknis kepada pelaku usaha dijalankan. dijelaskan dalam kebijakan penguatan ekosistem halal *value chain*.

3. Peningkatan Literasi, Inklusi, dan Kerjasama Multi-Pihak

Untuk membangun integritas ekonomi syariah, perlu kebijakan yang mempromosikan literasi halal dan keuangan syariah di semua lapisan masyarakat konsumen, pelaku usaha (terutama UMKM), akademisi serta pelatihan untuk auditor dan lembaga sertifikasi. Pemerintah juga harus menyediakan akses finansial dan non-finansial (fasilitas sertifikasi gratis atau biaya terjangkau, pembiayaan syariah, pasar ekspor) agar usaha kecil bisa masuk ke pasar halal. Kerjasama antara pemerintah, swasta, lembaga keagamaan, dan riset/inovasi juga perlu diperkuat untuk mendorong produk halal berdaya saing global.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 155-163 (menggantikan PP No. 39/2021), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 99, Tambahan Lembaran Negara No. 7067 (Jakarta: Sekretariat Negara, 16 Oktober 2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024> (diakses 25 Oktober 2025).

Industri halal global diproyeksikan akan terus mengalami perkembangan pesat. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) yang diterbitkan di tahun 2023 yang dirilis oleh DinarStandard, dalam sepuluh tahun terakhir, ekonomi Islam global telah meningkat dari USD 1,62 triliun di tahun 2012 menjadi USD 2,29 triliun pada 2022. Ekonomi Islam global diproyeksikan akan terus tumbuh, di tahun 2025 nilainya diperkirakan akan mencapai USD 2,8 triliun dengan *compound annual growth rate* (CAGR) sebesar 7,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi islam global tersebut juga turut mendorong perkembangan industri halal dunia.¹⁷¹

Salah satu pendorong terbesar perkembangan industri halal global adalah pertumbuhan populasi muslim dunia, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 miliar juta orang di tahun 2030. Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi hubglobal bagi perekonomian syariah. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Perpres No. 28 Tahun 2020 yang mempunyai tugas untuk

¹⁷¹ DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy 2023/24 Report*, 10th ed. (New York: DinarStandard, 2023), hlm. 8-12

mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan *syariah* nasional.

D. Visi Penguatan Nilai Ekonomi Syariah

Visi masa depan adalah menjadikan sertifikat halal sebagai fondasi utama integritas nilai ekonomi syariah yang digital, transparan, dan inklusif. Dengan sertifikasi yang kuat dan terpercaya, ekonomi halal dapat menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, sekaligus mendukung Indonesia sebagai global hub industri halal. Nilai kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan dalam syariah akan menjadi panduan utama di tengah dinamika digitalisasi, memastikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga etika dan budaya ekonomi Islam yang berorientasi kesejahteraan masyarakat luas.¹⁷²

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang pesat, tidak hanya sebagai sektor ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sektor ekonomi syariah, terutama sektor

¹⁷² Dara Haspramudilla, “Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global,” *Media Keuangan*, 25 Oktober 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global> (Diakses 26 Oktober 2025).

keuangan syariah, industri halal, dan keuangan sosial syariah, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, dibutuhkan upaya terus-menerus dalam memperkuat sektor-sektor terkait, memperluas akses digital, dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah.¹⁷³

Ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dan memperlihatkan kontribusi yang terus meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi *syariah* memiliki peranan penting dalam perubahan ekonomi menuju Indonesia maju. Indonesia memiliki potensi yang besar dari nilai sectoral industri halal. Pengembangan industri halal menjadi kegiatan penting dalam perencanaan strategi peningkatan ekonomi Indonesia. Industri halal menjadi kekuatan bersaing dalam konstelasi perdagangan internasional, hal ini karena telah menjadi dasar konsumen yang semakin meningkat. Halal menjadi karakteristik universal dalam menjamin kualitas produk dan standar hidup.

Sertifikasi halal menjadi elemen penting yang berpengaruh dan memberikan kontribusi dalam

¹⁷³ Dara Haspramudilla, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global," *Media Keuangan*, 25 Oktober 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global> (Diakses 26 Oktober 2025).

pengambilan keputusan pembelian suatu produk oleh konsumen. Industri halal sebagai elemen dari ekonomi Islam. Berdasarkan *the state of global Islamic economic report* 2018/2019 terdapat *framework* ekonomi etika global yang dapat memicu peranan ekonomi Islampada ranah global.¹⁷⁴

Halal *value chain* merupakan konsep yang mengelola ekosistem bisnis, tidak hanya berpatokan pada sektor perdagangan, tetapi juga mengakses pada pariwisata halal dan financial. Perkembangan dan perubahan *life style* masyarakat yang semakin kompleks diperlukan sebuah tanggapan yang baik melalui penyesuaian rantai pasok sebagai kunci utama. Kehalalan produk telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya “Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah”. Ekosistem industri halal mencakup beberapa aspek di dalamnya yang perlu menjadi perhatian diantaranya:¹⁷⁵

- 1) Aspek pembiayaan dan pendanaan,

¹⁷⁴ DinarStandard and Thomson Reuters, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19: An Inclusive Ethical Economy* (Dubai: Dubai International Financial Centre, 2018), 12-15, <https://islamicbankers.center/wp-content/uploads/2019/02/thomson-reuters-difc-state-of-the-islamic-economy-report-2018>.(Diakses 21 September 2025).

¹⁷⁵ Puji Muniarty dkk., *Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia*, Cetakan Pertama (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, Februari 2023), hlm. 3-5.

2) Proses produksi, dan

3) Regulasi.

Dalam membuat industri halal, diperlukan ekosistem halal, karakteristik ini tidak hanya dilihat dari bahan baku dan produksi, namun juga termasuk finansial yang tercakup kekuatan regulasi, sehingga keuangan syariah memiliki peranan krusial dalam membentuk ekosistem industri halal.

Visi ini menekankan penguatan ekosistem halal *value chain* sebagai fondasi utama untuk mengembangkan industri halal yang adaptif terhadap era *society 5.0*, di mana teknologi digital seperti *AI*, *blockchain*, dan big data diintegrasikan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan integritas sertifikasi halal. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah melalui pemenuhan permintaan pasar global, dengan fokus pada kolaborasi *stakeholder* (pemerintah, konsumen, industri, dan investor) sebagai fasilitator yang menghubungkan *supply* dan *demand*. Sertifikat halal menjadi simbol kebersihan, kualitas, dan kepatuhan syariah, yang diperkuat oleh regulasi seperti UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019, untuk mendukung pertumbuhan aset keuangan *syariah* Indonesia hingga mencapai posisi terdepan secara global.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Puji Muniarty dkk., *Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia*, Cetakan Pertama (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, Februari 2023), hlm.28-30.

Visi penguatan nilai ekonomi syariah di era 5.0 menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan integritasnya. Sertifikat halal tidak hanya menjadi jaminan kepatuhan syariah dalam produk dan jasa, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah yang kompetitif dan relevan di pasar global yang semakin terdigitalisasi dengan teknologi maju seperti AI, *blockchain*, dan digitalisasi finansial. Penguatan ekosistem halal melalui sertifikasi digital dan integrasi teknologi era *society 5.0* diyakini mampu menciptakan sinergi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga memperkuat posisi halal sebagai nilai ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga integritas keuangan syariah.¹⁷⁷

Selain itu, visi ini mencakup akselerasi digitalisasi sertifikat halal dan rantai nilai halal (*Halal Value Chain*) yang terdiri dari berbagai sektor, seperti pangan, fashion muslim, pariwisata halal, dan keuangan syariah, untuk meningkatkan daya saing dan mendorong inklusi ekonomi syariah yang luas. Penguatan integritas ekonomi syariah juga dilakukan dengan memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, serta literasi masyarakat terhadap produk halal yang tidak hanya

¹⁷⁷Puji Muniarty dkk., *Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia*, Cetakan Pertama (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, Februari 2023), hlm.28-30.

memenuhi syariat, tetapi juga standar kualitas dan keberlanjutan.¹⁷⁸

Sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah ini dapat dilihat dari adanya upaya yang dilakukan dengan melakukan penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui akselerasi digitalisasi. Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputinya Juda Agung mengatakan “dalam program rantai pasok halal (Halal *Value Chain*) harus mampu mendukung ekonomi dan keuangan syariah dengan upaya akselerasi digitalisasi sertifikat halal dan digitalisasi keuangan sosial ZISWAF (Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf).

Sertifikasi halal mendorong prestasi Indonesia melalui penerapan sistem ekonomi syariahnya, hal ini dapat dilihat dari prestasi yang dimiliki Indonesia dengan sistem ekonomi syariah dengan mengarahkan ekosistem halal yang ada. Laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2023 menempatkan Indonesia peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang

¹⁷⁸ KNEKS, *Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik*, "KNEKS.go.id, 5 Juni 2023, <https://kneks.go.id/berita/569/indonesia-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-terbaik>, (Diakses pada 26 Oktober 2025).

berada pada posisi ke-2 dan Malaysia menempati posisi teratas.¹⁷⁹

UMKM Halal *on Board* dalam platform digital dapat meningkatkan efesiensi dan meningkatkan saluran pemasran dalam dan luar negeri. Sektor yang memiliki peluang tinggi adalah makan dan minuman. Hal ini disampaikan Dirjen Industri Agro pada Tahun 2022 pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 3,75% triwulan 1 tahun 2022 yang mana lebih tinggi dibanding 2021 diangka 2,45%. Menteri Industri Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa tahun 2022 pada bulan Januari sampai Juni ekspor makanan dan minuman mencapai \$21,3 miliar, hal ini menunjukkan peningkatan 9% dibanding tahun 2021 dengan nilai pencapaian \$19,5 miliar.¹⁸⁰

Visi penguatan nilai ekonomi syariah dalam menghadapi sertifikat halal menuntut kesiapan dan sinergi seluruh ekosistem halal untuk mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era modern ini. Sertifikat halal bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pondasi

¹⁷⁹ KNEKS, *Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik*, "KNEKS.go.id, 5 Juni 2023, <https://kneks.go.id/berita/569/indonesia-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-terbaik>, (Diakses pada 26 Oktober 2025).

¹⁸⁰ *Kemenperin optimistis industri makanan dan minuman tumbuh 7 persen*, "AntaraNews.com, 7 September 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3104205/kemenperin-optimistis-industri-makanan-dan-minuman-tumbuh-7-persen>, (Diakses pada 26 Oktober 2025).

strategis dalam memperkuat kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Visi penguatan nilai ekonomi syariah melalui sertifikasi halal mencerminkan komitmen untuk menjadikan produk halal sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sertifikat halal tidak hanya sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendorong inovasi, ekspansi pasar, dan peningkatan daya saing pelaku usaha, terutama UMKM. Dengan penguatan ekosistem halal yang melibatkan regulasi, teknologi, dan dukungan pembiayaan syariah, sertifikasi halal mampu mempercepat terwujudnya ekonomi syariah yang inklusif, transparan, dan berdaya saing global, sehingga dapat menjadi kontribusi nyata untuk kemajuan ekonomi umat dan bangsa secara keseluruhan.¹⁸¹

¹⁸¹ KNEKS, *Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik*, "KNEKS.go.id, 5 Juni 2023, <https://kneks.go.id/berita/569/indonesia-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-terbaik>, (Diakses pada 26 Oktober 2025).